Jl. Ir. H. Juanda RT 7/16 Sidanegara Cilacap Telp/Fax. 0282-547566 Email. corporatepuma@gmail.com

Nomor : 001/PMK/III/2022 Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Sanggahan Hasil Lelang

Kepada

Panitia : POKJA Pemilihan Pembangunan Gedung RAMP RSUD Brebes

Jl. P. Diponegoro No. 141 Brebes

Perihal : Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan

**Gedung RAMP RSUD Brebes** 

Dengan Hormat,

Berdasarkan Hasil Evaluasi pada lpse.brebeskab.go.id perihal Tender: Pembangunan Gedung RAMP RSUD Brebes dengan Kode Tender 5181148 Dokumen Pemilihan Nomor: 5181148/Dokpil/II/2022 pada tanggal 04 Februari 2022 dengan Hasil Pemenang Tender: CV. CIAGENG SURYA KENCANA, No NPWP 94.596.748.7-518.000 Kami peserta pemilihan penyedia barang/jasa dengan Urutan hasil Peringkat Ke- 1 (Lebih Rendah Dari Pemenang) merasa dirugikan akibat Dugaan penyalahgunaan wewenang dan rekayasa tertentu oleh panitia POKJA atau ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya atau adannya indikasi persengkokolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang tidak sehat:

# Dan dengan memperhatikan:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Karya
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- LKPP RI no 9 tahun 2018 tentang Pedoman pelaksaan barang dan jasa
- Peraturan pemerintah No 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang no 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No 14 Tahun 2021 tentang perubahan peraturan pemerintah no 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 Tentang jasa konstruksi
- Peraturan presiden nomor 106 Tahun 2007 tentang lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 157 tahun 2014 tentang perubahan presiden No 106 tahun 2007 tentang lembaga kebijakan

- pengadaan barang / jasa pemerintah (Lenbaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 314 )
- Peraturan presiden No 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 33)
- Peraturan kepala kebijakan pengadaan / jasa pemerintah No 4 tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (berita negara republik indonesia tahun 2017 No 1372)

Adapun dugaan Penyalahgunaan wewenang dan rekayasa tersebut adalah:

# 1. Hasil Evaluasi Lelang yang tidak akurat.

Berdasarkan Pasal 81 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang bunyinya:

Paragraf Kedelapan

Sanggahan

Pasal 81

- (1) Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:
  - a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
  - c. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya..

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, pada Lampiran I dijelaskan mengenai Evaluasi Penawaran.

Pasal 81

Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur adalah:

- a. tidak memenuhi persyaratan; dan
- b. tidak mengikuti prosedur tata urut proses.

### Huruf b

Yang dimaksud rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, misalkan:

- a. Penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku cadang;
- b. Kriteria penilaian evaluasi yang tidak rinci (detail) sehingga dapat mengakibatkan penilaian yang tidak adil dan transparan; dan
- c. Penambahan persyaratan lainnya yang diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden.

#### Huruf c

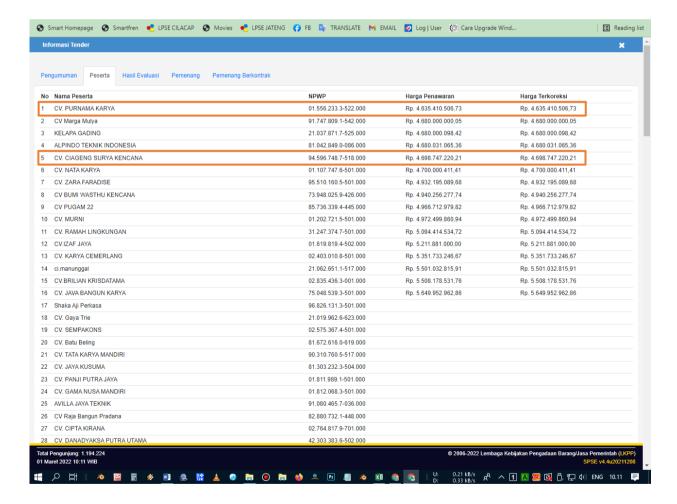
Yang dimaksud dengan adanya penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang sengaja dilakukan diluar kewenangan terkait proses pengadaan. Yang dimaksud dengan pejabat berwenang lainnya adalah PA/KPA, Kepala Daerah, PPK, Tim Pendukung, dan Tim Teknis.

# 2. Kami Termasuk Penawar dengan harga rendah

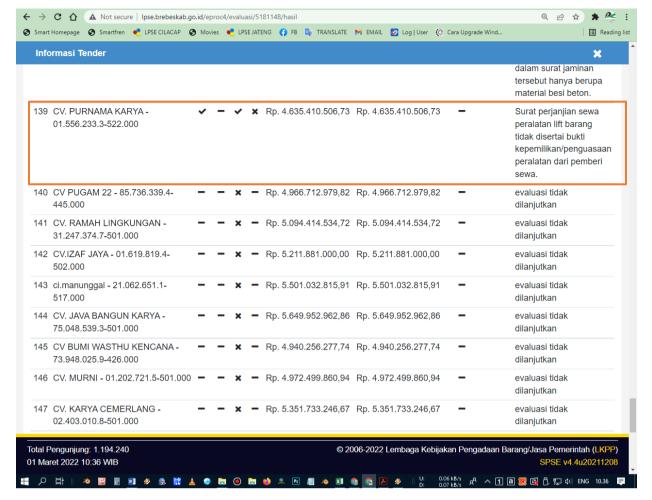
Berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor : 5181148/Dokpil/II/2022 pada tanggal 04 Februari 2022 tentang Evaluasi Dokumen Penawaran disebutkan bahwa :

- 28. Evaluasi Dokumen Penawaran
- Evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem harga terendah sistem gugur.
- 28.2. Pokja melakukan evaluasi Dokumen Penawaran berdasarkan data yang diunggah (*upload*) dalam SPSE, dikecualikan untuk evaluasi Jaminan Penawaran dilakukan berdasarkan dokumen Jaminan penawaran yang disampaikan.

Dan dari hasil Evaluasi Rangking peserta, CV. PURNAMA KARYA mendapat Rangking ke-1 yang berarti merupakan penawar dengan harga terendah.



3. CV. PURNAMA KARYA menemukan adanya beberapa kekeliruan dari Hasil Evaluasi yang disebutkan POKJA pada <a href="http://lpse.brebeskab.go.id/eproc4/evaluasi/5181148/hasil">http://lpse.brebeskab.go.id/eproc4/evaluasi/5181148/hasil</a> mengenai Dokumen Kualifikasi yang di tawarkan (upload) CV. PURNAMA KARYA. Berikut ini merupakan Hasil Evaluasi dari POKJA:



Dari Hasil Evaluasi tersebut CV. PURNAMA KARYA Berasumsi bahwa terdapat kekeliruan evaluasi dari POKJA dikarenakan Dokumen Kualifikasi yang CV. PURNAMA KARYA tawarkan (upload) sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 5181148/Dokpil/II/2022 pada tanggal 04 Februari 2022. Berikut ini merupakan penjelasan kebenaran dokumen yang kami tawarkan (upload) atau tawarkan:

1) Dari Hasil Evaluasi POKJA menyebutkan bahwa "Surat perjanjian sewa peralatan lift barang tidak disertai bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa." Hal ini dikarenakan dukungan alat tersebut yang berupa lift barang merupakan hasil pabrikan sendiri sehingga kami hanya melampirkan surat dukungan. Artinya, lift barang tersebut tidak membeli dari pabrik manapun dan dari perorangan merupakan pabrikasi dari perusahaan atau bengkel sendiri sehingga tidak terdapat kwitansi atau faktur pembelian.

Akan tetapi, sebagai dokumen pendukung CV. PURNAMA KARYA melampirkan Surat Bukti Kepemilikian Barang atau Alat yang dibuat oleh PT. MULIA KARYA PRIMA selaku pihak yang mengeluarkan dukungan dan alat berupa lift barang. Berikut ini merupakan Surat Bukti Kepemilikan Barang atau Alat tersebut:



#### PT. MULIA KARYA PRIMA

Ruko Tlogomas Square Kav. 24, Kec. Lowokwaru Kota Malang, Jawa Timur 65144 0812-9393-9441 | 0341 (5090208)

www.muliakaryaprima.com

#### SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN BARANG

Nomor: 08/SKKB/MKP/II/2022

Malang, 08 Februari 2021

Dengan ini,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Perusahaan

: PT. MULIA KARYA PRIMA

General Manager

: Fian Affandi

Alamat

: Ruko Tlogomas Square Kav 24, Tlogomas, Kec. Lowokwaru Kota

Malang Jawa Timur

Telp

: 0341 - 5090208

Bahwasanya nama barang tersebut dibawah ini adalah pabrikasi sendiri dan benar milik PT. Mulia Karya Prima

No.	Nama Peralatan	Merek	Tipe	Kapasitas	Jumlah	Tahun Pembuatan
1	Lift Barang	Sparta Lift	Elektrik	1000 kg	2 Unit	2019

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya,untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 08 Februari 2021



Untuk memperkuat Bukti Kepemilikan Barang dan Alat tersebut CV. PURNAMA KARYA melakukan konfirmasi ulang ke PT. MULIA KARYA PRIMA, oleh karena itu PT. MULIA KARYA PRIMA mengeluarkan kembali Bukti Kepemilikan Barang atau Alat tersebut berupa Surat Keterangan Kepemilikan Barang dengan No. 08/SKKB/MKP/III/2022 yang dikeluarkan tanggal 01 Maret 2022. Berikut ini Surat Bukti Kepemilikan Barang atau Alat tersebut.



#### PT. MULIA KARYA PRIMA

Ruko Tlogomas Square Kav. 24, Kec. Lowokwa Kota Malang, Jawa Timur 65144 0812-9393-9441 | 0341 (5090208) marketing@muliakaryaprima.com

www.muliakarvaprima.com

## **SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN BARANG**

No: 08/SKKB/MKP/III/2022

Malang, 01 Maret 2022 Dengan ini, Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Perusahaan

: PT. MULIA KARYA PRIMA

Direktur

: Fian Affandi

Alamat

: Ruko Tlogomas Square Kav. 24 Kel. Tlogomas,

Kec. Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur, 65144

Sehubungan dengan keikutsertaan **CV. Purnama Karya** pada paket pekerjaan **Pembangunan Gedung RAMP RSUD Brebes oleh Pokja pemilihan 4a Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah** yang beralamatkan di Gedung D Setda Provinsi Jawa Tengah, Jl. Pahlawan No. 9 Semarang. Maka dengan ini saya menyatakan benar, alat – alat yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut hasil pabrikasi sendiri dan milik **PT. MULIA KARYA PRIMA.** 

No.	Peralatan	Merk	Tipe	Kapasitas	Jumlah	Tahun Pembuatan
1.	Lift Barang	Sparta Lift	Elektrik	1000 kg	2 Unit	2019

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya,untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 01 Maret 2022
PT. MULIA KARYA PRIMA

Fian Affandi Direktur

CV. PURNAMA KARYA juga melampirkan bukti foto pabrikasi bahwa PT. MULIA KARYA PRIMA merupakan perusahaan yang memproduksi barang atau alat lift barang.



- 2) Panitia POKJA tidak melakukan survey atau klarifikasi sesuai dengan urutan prosedur klarifikasi evaluasi atas dukungan barang atau alat terhadap PT. MULIA KARYA PRIMA sebagai pabrikator dan pendukung produksi lift barang CV. PURNAMA KARYA dengan tidak dibuktikannya berita acara survey ke lokasi pabrik atau konfirmasi via telepon sehingga cacat hukum.
- 3) PT MULIA KARYA PRIMA bersedia untuk dilakukan konfirmasi kebenaran dukungan dan ketersediaan alat yang dapat dikonfirmasi pada nomor 0812-9393-9441 atas nama Rekza Maulana Abdulah selaku Kepala Bagian.

Demikian Surat Sanggahan ini kami buat untuk dapat menjadikan periksa, agar dapat di evaluasi Ulang Atau Tender Ulang agar lebih teliti dalam menyikapi secara tepat agar terjadi lelang yang sehat dan tidak ada pengaturan ataupun tekanan dari pihak manapun, sehingga untuk kedepan LPSE Brebes bisa lebih Transparan, Atas Perhatianya kami ucapkan terima kasih.

Cilacap, 02 Maret 2022 CV. PURNAMA KARYA

WAHYU TRI WINARNI, SE

Direktur Utama

# Tembusan:

- 1. Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes
- 2. PA / KPA Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes
- 3. Kapolda Jawa Tengah Unit Tipikor
- 4. Kejaksaan Tinggi Semarang sebagai tembusan
- 5. Arsip



# PEMERINTAH KABUPATEN BREBES SEKRETARIAT DAERAH

# BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

JL. P. Diponegoro No. 141 Telp. ( 0283 ) 671031 - 671032 Fax 672323 BREBES 52212

Brebes, 04 Maret 2022

Nomor : 5118148/JS/III/2022

Lampiran : -

Perihal : Jawaban Sanggahan

Kepada Yth.

Direktur CV. PURNAMA KARYA

di

Tempat

Menjawab sanggahan dari Saudara nomor 001/PMK/III/2022 tanggal 02 Maret 2022 pada tender PEMBANGUNAN GEDUNG RAMP RSUD BREBES, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Dalam sanggahan Saudara masih mencantumkan ketentuan di dalam Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010, padahal peraturan tersebut sudah dicabut dengan Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 2. Evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem harga terendah sistem gugur, serta pokja pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: evaluasi administrasi; evaluasi teknis; dan evaluasi harga. Walaupun perusahaan Saudara merupakan peserta tender dengan nilai penawaran terendah, namun penawaran Saudara tidak lulus dalam evaluasi teknis. Penawaran Saudara tidak lulus dalam evaluasi teknis dengan alasan Surat perjanjian sewa peralatan lift barang tidak disertai bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa.
- 3. Berdasarkan dokumen pemilihan nomor 5181148/Dokpil/II/2022, disebutkan bahwa bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa.
- 4. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pokja pemilihan terhadap dokumen penawaran Saudara, tidak ditemukan bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa untuk peralatan lift barang, sebagaimana bukti kepemilikan/penguasaan tersebut dilampirkan pada sanggahan Saudara. Hal ini untuk selanjutnya menjadi dasar bagi pokja pemilihan untuk menggugurkan penawaran Saudara dalam evaluasi teknis.
- 5. Berdasarkan dokumen pemilihan nomor 5181148/Dokpil/II/2022, disebutkan bahwa peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi yang tidak memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan merupakan risiko peserta.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami nyatakan sanggahan Saudara tidak diterima.

Kelompok Kerja Pemilihan

TTD